

UPAYA DAN TANTANGAN THAILAND DALAM PENANGGULANGAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG MENUJU DRUG-FREE ASEAN 2015

Anggia Wulansari

ABSTRAK

Permasalahan narkoba telah menjadi isu yang meresahkan banyak negara, tak terkecuali ASEAN. Letak Asia Tenggara yang strategis menjadikannya rentan sebagai jalur perdagangan narkoba internasional. Tidak hanya itu, di wilayah ini juga terdapat Setiga Emas yang merupakan kawasan penghasil opium berkapasitas dunia. Menanggapi adanya ancaman keamanan akibat permasalahan narkoba, ASEAN kemudian mencanangkan Drug Free 2015. Penelitian ini menelaah upaya Thailand dan tantangan yang dihadapinya dalam rangka mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015. Penelitian ini didasari pada masalah perdagangan narkoba di ASEAN sehingga mendorong terbentuknya Drug-Free ASEAN 2015. Thailand menjadi salah satu negara ASEAN yang memiliki kesadaran untuk mengambil beberapa upaya guna memberantas narkoba. Kebijakan yang diambil oleh Thailand didasari pada fakta bahwa Thailand merupakan salah satu negara kawasan Segitiga Emas, pusat produksi opium ketiga dunia. Selain itu posisi strategis Thailand sering dimanfaatkan sebagai jalur penyelundupan narkoba ke dunia internasional. Upaya Thailand dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 tentunya memiliki tantangan tersendiri dan hal tersebut yang akan diteliti dalam penelitian ini. Permasalahan Thailand tersebut dianalisis menggunakan kerangka pemikiran yang terdiri atas konsep *transnational crime* untuk menganalisis urgensi masalah narkoba di ASEAN, khususnya di Thailand dan Teori Kebijakan untuk menjelaskan kebijakan yang diambil oleh Thailand dalam penanggulangan narkoba menuju Drug Free ASEAN 2015. Berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan, dapat ditarik satu hipotesis yaitu untuk mewujudkan Drug-Free ASEAN di tahun 2015, Thailand mengambil beberapa upaya untuk memberantas narkoba secara internal dan eksternal. Selain melakukan upaya-upaya tersebut, Thailand juga dihadapkan pada beberapa tantangan untuk mewujudkan *Drug-Free ASEAN 2015* yang disebabkan oleh kepentingan ekonomi, kurang maksimalnya penegakan hukum, dan adanya ikatan kebudayaan dalam penggunaan narkoba di kalangan masyarakat. Untuk membatasi jangkauan penelitian, peneliti memilih tahun 2000 sebagai titik awal dan 2011 sebagai titik akhir dalam penelitian. Penelitian ini merupakan tipe deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka.

Keyword : upaya, tantangan, Thailand, narkoba, *transnational crime*,

Perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang saat ini menjadi semakin marak berlangsung, terutama dengan adanya perkembangan alat

transportasi dan komunikasi di era globalisasi. Beredarnya narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat menimbulkan konsekuensi tersendiri di kalangan masyarakat yang harus dihadapi oleh pemerintah setempat, seperti degradasi kualitas sumber daya manusia, peningkatan tindak kejahatan, hingga meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS dikarenakan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang dengan menggunakan jarum suntik yang dipakai secara bersama-sama. Munculnya beragam masalah akibat peredaran dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat tersebut menuntut adanya tindakan dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang dan berbagai konsekuensi yang ditimbulkannya.

Dalam menghadapi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang negara-negara anggota Association of South East Asia Nations (ASEAN) telah membuat kesepakatan terkait penciptaan kawasan ASEAN yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang. Kesepakatan untuk menjadikan negara-negara di ASEAN bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang telah dilakukan sejak tahun 1998. Melalui pertemuan para menteri luar negeri negara-negara anggota ASEAN di Manila pada 1998, mereka menetapkan *Joint Declaration for A Drug-Free ASEAN*. Salah satu hasil deklarasi bersama ini adalah kesepakatan untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah bebas narkoba dan obat-obatan terlarang pada tahun 2020 (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean>, diakses 15 Maret 2013). Selanjutnya, pada *The 33rd ASEAN Ministerial Meeting* di Bangkok pada 2000, para delegasi menyepakati percepatan realisasi *Drug-Free ASEAN* dari tahun 2020 ke tahun 2015 (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean>, diakses 15 Maret 2013). Pada tahun-tahun berikutnya, beberapa pertemuan turut digelar untuk membahas *Drug-Free ASEAN 2015*, seperti *Bangkok Political Declaration in Pursuit of a Drug-Free ASEAN 2015* di tahun 2000, *the ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use (2009-2015)* pada 2009, dan *Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations (Bali Concord III)* yang diselenggarakan tahun 2011 (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean>, diakses 15 Maret 2013).

Di antara negara anggota yang telah membuat kesepakatan untuk secara bersama-sama menciptakan kawasan ASEAN bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, Thailand merupakan salah satu negara yang berupaya menanggulangi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju *Drug-Free ASEAN 2015*. Upaya Thailand untuk memberantas produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah Thailand yang memiliki keterikatan cukup erat dengan obat-obatan terlarang. Sejarah Thailand terkait obat-obatan terlarang ditandai dengan adanya penemuan aktivitas perdagangan opium antara Thailand dengan Cina di era Sukhothai atau pada 1282 Masehi (Chamnivikaipong, n.d). Pada perkembangan selanjutnya, Thailand tidak hanya mengambil peran dalam aktivitas perdagangan opium semata, tapi juga melakukan aktivitas penanaman opium. Daerah Thailand bagian utara telah cukup lama dikenal sebagai bagian dari kawasan Segitiga Emas dan merupakan salah satu sumber utama penghasil obat-obatan terlarang di dunia.

Selama kurun waktu 1970-an hingga 1990-an Thailand bersama Laos dan Myanmar menjadi kawasan penghasil narkoba dan obat-obatan terlarang jenis opium terbanyak di dunia. Kawasan budidaya opium di ketiga negara Thailand dikenal sebagai Segitiga Emas. Wilayah ini merupakan daerah pegunungan perbatasan dari tiga negara, yaitu Myanmar, Laos, dan Thailand. Daerah ini dikenal di penjuru dunia sebagai wilayah penting bagi penanaman dan pemasaran opium selama berabad-abad. Istilah Segitiga Emas bagi kawasan ini dipopulerkan oleh jurnalis Barat pada awal tahun 1970-an yang merujuk pada salah satu daerah penghasil utama untuk opium ilegal dan turunannya, seperti morfin dan heroin, di tingkat dunia (Crooker, 1988: 245). Di tahun 1996, daerah Segitiga Emas memiliki lahan

budidaya opium seluas 190.520 hektar dan mampu menghasilkan sekitar 2790 kilogram pasta opium (Taskarina, 2010: 205). Besarnya kapasitas produksi pasta opium yang dihasilkan oleh daerah Segitiga Emas menjadikannya sebagai penyumbang produksi opium terbesar di dunia dengan prosentase mencapai 65% atau setara dengan 160 miliar dollar Amerika Serikat per tahunnya (Taskarina, 2010: 205). Selanjutnya, opium yang dipanen tersebut juga dijadikan sebagai bahan utama untuk memproduksi morfin maupun heroin.

Peran Thailand dalam budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang tidak hanya sebatas pada jenis opium. Budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang jenis ganja dan kratom juga ditemukan di Thailand dengan skala yang lebih kecil dibandingkan opium. Tidak hanya itu, Thailand juga menjadi produsen narkoba dan obat-obatan terlarang yang terbuat dari bahan-bahan kimia seperti jenis metamfetamin. Narkoba dan obat-obatan terlarang jenis tersebut tengah mengalami kepopuleran di kalangan pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang Thailand. Dari sekitar 1,4 juta pecandu narkoba dan obat-obatan terlarang di tahun 2011, 1,1 juta di antaranya merupakan pengguna metamfetamin (http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6105&a=2, diakses 15 Maret 2013).

Selain dikarenakan memiliki peran sebagai salah satu produsen obat-obatan terlarang, urgensi Thailand dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang juga disebabkan intensitas aktivitas perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang tinggi. Letak Thailand yang strategis sering digunakan sebagai jalur transit bagi penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang dari wilayah Segitiga Emas ke beberapa kawasan dunia, seperti Amerika Utara, Eropa, dan kawasan Asia lainnya (Emmers, 2002: 6). Tidak hanya itu, produksi narkoba dan obat-obatan terlarang yang tidak mampu memenuhi permintaan membuat para pelaku perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang untuk mendatangkan barang terlarang tersebut dari negara lain, seperti Laos atau Myanmar. Kompleksitas masalah narkoba dan obat-obatan terlarang yang terdapat di Thailand setempat menuntut pemerintah setempat untuk segera mungkin mengambil beberapa upaya penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju implementasi Drug-Free ASEAN 2015.

Drug-Free ASEAN 2015 yang dideklarasikan bersama-sama oleh negara-negara anggota ASEAN, merupakan suatu upaya untuk membersihkan kawasan ASEAN dari peredaran dan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, masing-masing negara anggota ASEAN berupaya untuk mewujudkan tercapainya zona ASEAN yang bebas dari peredaran dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di tahun 2015, termasuk Thailand. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti mengenai upaya Thailand untuk membersihkan wilayahnya dari peredaran dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dalam mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 menghadapi tantangan tersendiri, terlebih dengan adanya kawasan Segitiga Emas. Di lain pihak, terdapat beberapa faktor lain yang sekiranya menjadi tantangan bagi upaya Thailand tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Realitas Produksi dan Perdagangan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Asia Tenggara

Produksi dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara merupakan aktivitas lama yang telah ditemukan di kawasan ini sejak abad ke-19. Produksi narkoba di Asia Tenggara paling banyak ditemukan di Laos, Myanmar, dan Thailand. Di Laos tempat budidaya opium banyak dilakukan di bagian utara negara ini, seperti propinsi Phongsaly, dan bagian barat, propinsi Xieng Khouang, khususnya di distrik Nonghet dan Xam Nue. Sedangkan di Myanmar lahan budidaya opium banyak ditemukan di dua distrik yang berada di propinsi Shan, khususnya distrik Wa dan distrik Kokang yang terletak di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Cina (Emmers, 2003: 1). Letak geografis distrik Wa dan distrik Kokang yang berbatasan langsung dengan Cina memberikan

keuntungan tersendiri bagi proses perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang selanjutnya. Di Thailand wilayah utama pembudidayaan opium terletak pada pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Ladang opium dalam skala besar juga ditemukan di beberapa desa sebelah barat dan barat daya kota Chiang Mai. Selain di Laos, Myanmar, dan Thailand, ladang penanaman opium juga ditemukan di Vietnam namun dalam skala yang lebih kecil. Berbeda dengan tiga negara lainnya yang menghasilkan panen opium dalam jumlah yang besar, produksi opium di ladang –ladang Vietnam hanya dalam jumlah yang terbatas (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2009: 7).

Meskipun Asia Tenggara dikenal karena budidaya opium dan pengolahan heroin, tapi narkoba dan obat-obatan terlarang jenis heroin yang dibuat dari opium tidak hanya menjadi satu-satunya jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang diproduksi di kawasan Asia Tenggara. Jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang juga banyak diproduksi di Asia Tenggara adalah narkoba dan obat-obatan terlarang yang memiliki kandungan ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) di dalamnya. United Nations Office on Drugs and Crime (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME) mendefinisikan ATS sebagai '*a group of substances comprised of synthetic stimulants including amphetamine, methamphetamine, methacathinone, and ecstasy-group substances*' (UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2011: 5). Narkoba dan obat-obatan terlarang dengan kandungan ATS banyak ditemukan dalam bentuk tablet dan bubuk. Jika opium dan heroin pada dasarnya digunakan sebagai obat penenang dan terapi oleh ahli kesehatan tapi kemudian disalahgunakan oleh masyarakat, narkoba dan obat-obatan terlarang berkandungan ATS diproduksi dengan tujuan agar penggunaannya mendapatkan sensasi halusinasi dan stimulan ketika mengkonsumsinya.

Disamping opium dan ATS, jenis narkoba dan obat-obatan terlarang lain yang ditemukan di Asia Tenggara adalah ganja. Serupa dengan opium, narkoba dan obat-obatan terlarang jenis ini diproduksi dari tanaman yang bernama Latin *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Berbeda dengan heroin yang diproses secara kimiawi dari opium untuk dapat digunakan, konsumsi ganja sebagai narkoba dan obat-obatan terlarang lebih mudah karena dapat dijadikan sebagai rokok pada umumnya. Budidaya tanaman ganja ini banyak ditemukan di negara-negara tropis, termasuk negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Di Vietnam, lokasi penanaman dalam skala kecil dapat ditemukan di kawasan pedesaan Vietnam selatan (US Department of State, n.d, 334).

Asia Tenggara tidak hanya menjadi salah satu kawasan penghasil narkoba dan obat-obatan terlarang tapi juga sebagai jalur perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang ke dunia internasional. Letak geografis Asia Tenggara yang strategis mendukung kawasan ini sebagai jalur perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di tingkat regional maupun internasional, termasuk narkoba dan obat-obatan terlarang yang akan diperdagangkan ke Amerika Utara, Eropa, Australia dan negara-negara di benua Asia lainnya. Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam merupakan rute penting bagi perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara ilegal ke dunia internasional, khususnya ke kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi jalur yang sering digunakan bagi pelaku yang menjadikan Australia sebagai target pasar mereka.

Kegiatan Produksi dan Perdagangan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Thailand

Opium bukan merupakan satu-satunya jenis narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibudidayakan atau diolah di Thailand. Budidaya atau pengolahan narkoba dan obat-obatan terlarang jenis lainnya juga dapat ditemukan di negara ini. Meskipun begitu, seiring dengan gencarnya upaya pemerintah dalam melawan budidaya, produksi, dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang membuat angka budidaya maupun pengolahan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand mengalami penurunan. Namun upaya

tersebut tidak sepenuhnya mampu mengurangi budidaya dan produksi narkotika dan obat-obatan terlarang secara keseluruhan karena pengolahan narkotika dan obat-obatan terlarang jenis tertentu justru mengalami fluktuasi dalam aktivitasnya.

Selama kurun waktu 2002-2004 produksi opium di Thailand menunjukkan adanya tren penurunan yang terjadi secara bertahap. Di tahun 2002, budidaya opium di utara Thailand menghasilkan opium sebanyak 3.855 kilogram. Pada tahun berikutnya, 2003, opium yang dihasilkan mengalami penurunan lebih dari 50% sehingga hanya 1,812 kilogram. Penurunan produksi opium secara drastis terjadi pada tahun 2004 dengan hasil panen hanya 103 kilogram. Selain disebabkan oleh faktor cuaca, menurunnya hasil produksi opium ini juga disebabkan oleh penghapusan ladang budidaya opium secara massal di bawah kerangka program War on Drugs yang ditetapkan oleh pemerintah Thailand di bawah pemerintahan Thaksin Shinawatra. Di tahun-tahun berikutnya, produksi opium dari ladang-ladang di Thailand mengalami tren yang fluktuatif. Kenaikan maupun penurunan hasil opium tidak terjadi secara signifikan. Tahun 2005, misalnya, ladang-ladang opium di Thailand secara keseluruhan hanya menghasilkan 137 kilogram.

Selain budidaya opium di Thailand juga ditemukan budidaya ganja atau marijuana. Mayoritas aktivitas budidaya ganja dilakukan di pedalaman hutan atau perbukitan, seperti di provinsi Mookdaharn yang terletak di bagian timur laut Thailand (OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD, 2010: 20). Budidaya ganja di Thailand berlangsung dalam skala kecil. Oleh karena itu, budidaya ganja di Thailand ini masih belum mampu memenuhi permintaan pasar sehingga penyelundupan ganja secara ilegal banyak dilakukan dari negara-negara tetangga Thailand. Disamping ganja dan opium, jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang turut dibudidayakan di Thailand adalah kratom. Jenis narkotika dan obat-obatan terlarang ini telah lama dikenal oleh kalangan pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand. Namun budidaya kratom secara intens baru ditemukan pada kurun waktu 2007. Budidaya tanaman ini tersebar di banyak pedesaan Thailand, tapi mayoritas ditemukan di kawasan selatan Thailand.

Berbeda dengan opium, ganja, dan kratom yang diperoleh melalui proses budidaya, narkotika dan obat-obatan terlarang ber-ATS didapatkan melalui pengolahan bahan-bahan kimia. Laboratorium pengolahan metamfetamin ditemukan di beberapa daerah di Thailand. Sebagian besar laboratorium metamfetamin ini ditemukan di Bangkok dan beberapa propinsi di sekitar Bangkok. Dalam menghasilkan metamfetamin, setidaknya terdapat tiga cara proses produksi :

1. Bubuk campuran bahan dasar metamfetamin ditekan menggunakan alat cetak yang memiliki lubang seperti pipa atau besi tabung. Melalui cara ini pelaku dapat menghasilkan tablet metamfetamin dalam skala kecil. Sebagian besar produsen metamfetamin yang menggunakan cara ini merupakan kalangan pengecer;
2. Bahan metamfetamin dalam bentuk bubuk ditekan menggunakan *single punch stamping heads* yang dapat memproduksi ya-ba dengan kuantitas yang lebih banyak dibandingkan cara yang pertama;
3. Metamfetamin hidroklorida dicampur dengan bahan dan zat kimia lainnya lalu dicetak menggunakan *single punch stamping heads* (OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD, 2002: 29-30).

Thailand merupakan negara dengan letak geografis yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari posisinya yang berbatasan langsung dengan tiga negara sekaligus dengan panjang perbatasan mencapai 3000 kilometer. Bentang perbatasan yang cukup panjang ini memberikan keuntungan bagi para pelaku perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang dalam menjalankan aktivitas ilegal mereka. Sejak tahun 2005, produksi narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand tidak lagi mampu memenuhi permintaan dari pasar internasional seiring dengan langkah pemerintah dalam pemberantasan ladang budidaya

dan laboratorium produksi . Hasil budidaya dan pengolahan narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand lebih banyak dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Namun, hasil budidaya dan pengolahan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dilakukan di Thailand masih belum cukup memenuhi permintaan pasar sehingga mendorong adanya masuknya narkotika dan obat-obatan terlarang ke wilayah Thailand.

Narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibawa masuk ke Thailand dilakukan melalui jalur darat, bandara, pelabuhan, dan sungai. Rute perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang melalui jalur darat di Thailand terbagi ke dalam lima wilayah, yaitu utara, barat, timur laut, selatan, dan timur. Perbatasan di sebelah utara merupakan jalur penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak digunakan oleh para pelaku perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Setiap tahunnya, sekitar 80% dari total narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan dari negara-negara tetangga ke Thailand berasal dari perbatasan ini. Penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang di perbatasan utara Thailand dilakukan melalui Chiang rai, Chiang Mai, Mae Hong Son dan Provinsi Tak (Office of the Narcotics Control Board, 2008: 21). Mayoritas narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui rute ini adalah metamfetamin, heroin, dan opium. Tingginya angka narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui perbatasan ini membuat penegak hukum setempat memperketat perbatasan utara Thailand. Hal ini kemudian berimbas pada penurunan jumlah narkotika dan obat-obatan terlarang yang diselundupkan melalui perbatasan utara Thailand sebesar 20% di tahun 2007 yang diiringi peningkatan penyelundupan narkotika dan obat-obatan terlarang di perbatasan timur dan timur laut sebesar 20% (OFFICE OF THE NARCOTICS CONTROL BOARD, 2007: 21). Jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang banyak diselundupkan melalui rute timur perbatasan Thailand berupa metamfetamin tablet dan ice serta ekstasi. Sedangkan perbatasan Thailand sebelah barat tidak begitu banyak digunakan dalam aktivitas perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Drug Free-ASEAN 2015

Wilayah Asia Tenggara memiliki sejarah yang cukup panjang terkait aktivitas produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Tidak hanya itu, kawasan ini juga dipergunakan sebagai jalur perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang ke tingkat internasional. Situasi tersebut mendorong adanya potensi ancaman terhadap keamanan kawasan Asia Tenggara. Menyadari adanya potensi ancaman akibat aktivitas produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang, negara-negara di Asia Tenggara yang tergabung sebagai anggota ASEAN menyepakati pencanangan Drug-Free ASEAN 2015. Berdasarkan skema Drug-Free 2015, kawasan ASEAN diproyeksikan akan terbebas dari produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam proses realisasi Drug-Free ASEAN, negara-negara anggota ASEAN telah melakukan beberapa kali pertemuan dan deklarasi. *Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN* di Manila pada 25 Juli 1998 menjadi deklarasi awal pencanangan Drug-Free ASEAN. Deklarasi ini merupakan bagian dari rangkaian perlawanan terhadap kejahatan transnasional, termasuk kejahatan produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil dari deklarasi tersebut, ASEAN menyepakati penguatan dan kerjasama antar negara untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan yang terbebas dari aktivitas produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang. Deklarasi bersama antar negara-negara ASEAN ini juga menetapkan tahun 2020 sebagai tenggat waktu untuk mewujudkan ASEAN yang bebas dari narkotika dan obat-obatan terlarang.

Pada pertemuan berikutnya, negara-negara ASEAN tidak hanya melakukan kesepakatan untuk mengupayakan penghapusan narkotika dan obat-obatan terlarang dari wilayah ASEAN tapi juga menyepakati perubahan tenggat waktu realisasi Drug-Free ASEAN. Jika pada deklarasi bersama di Manila 1998 para anggota menyepakati tahun 2020 sebagai tahun realisasi Drug-Free ASEAN, maka melalui pertemuan di Bangkok tahun 2000 tenggat

realisasi Drug-Free tersebut dipercepat menjadi tahun 2015. Hal tersebut tertuang dalam poin 56 hasil pertemuan *Joint Communique of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting 2000* sebagai berikut :

“The Foreign Ministers took note of the threat from drug abuse and drug trafficking on the security and stability of the ASEAN region, particularly its relations with transnational crime. They urged Member Countries to enhance joints efforts among all affected states in combating the drug menace, especially the newly emerging drugs like Methamphetamine or Amphetamine Type Stimulants (ATS). In this regard, they agreed to advance the target year for realizing a drug-free ASEAN from 2020 to 2015” (<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-33rd-asean-ministerial-meeting-bangkok-thailand-24-25-july-2000>, diakses 15 Maret 2013).

Selain mengungkapkan mengenai percepatan implementasi Drug-Free ASEAN, poin 56 dari *Joint Communique of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting 2000* juga turut memaparkan bahwa penyalahgunaan dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang mengancam stabilitas dan keamanan wilayah ASEAN. Lebih lanjut, keputusan untuk mempercepat realisasi Drug-Free ASEAN ini juga disebabkan oleh munculnya narkoba dan obat-obatan terlarang jenis ATS yang berkembang di negara-negara anggota ASEAN.

Setelah melakukan perubahan terhadap tenggat waktu penerapan Drug-Free 2015, ASEAN membentuk kerangka kerja untuk menyelaraskan kinerja nasional negara anggota dengan regional ASEAN dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pembentukan kerangka kerja ASEAN untuk menciptakan kawasan yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang didukung dengan adanya kerangka kerja yang diciptakan untuk diimplementasikan di tingkat regional maupun internasional. Kerangka kerja regional ASEAN menuju Drug-Free 2015 terbagi dalam tiga macam, yaitu ACCORD (*ASEAN – China Cooperatative Operation in Response to Dangerous Drugs*), ASOD (*ASEAN Senior Officials on Drug matters*), dan MOU terkait kontrol narkoba dan obat-obatan terlarang. ACCORD dihasilkan melalui kerjasama antara ASEAN dan Cina. ASEAN tidak menutup mata bahwa Cina memiliki peran penting dalam memerangi perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, Dari kerjasama antara ASEAN dan Cina tersebut dihasilkan *ACCORD Plan of Action*.

Selain *ACCORD Plan of Action*, kerangka kerja Drug-Free ASEAN lainnya adalah *Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking, and Use* (2009-2015). Rencana kerja ini merupakan hasil dari *The 30th Meeting of the ASEAN Senior Officials on Drug matters* (ASOD) yang diselenggarakan di Kamboja pada 29 – 30 September 2009. Sekretariat ASEAN juga menggelar *Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendations* bersama Amerika Serikat. Berdasarkan workshop tersebut, ditetapkan bahwa visi dari Drug-Free ASEAN 2015 adalah untuk mengontrol narkoba dan obat-obatan terlarang dan mengurangi konsekuensi negatif yang ditimbulkan secara efektif dan sukses (Mere, n.d: 3). Lebih lanjut, visi Drug-Free ASEAN 2015 juga meliputi pengurangan secara signifikan dan berkelanjutan terhadap budidaya tanaman terlarang; industri dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang ilegal dan segala kejahatan yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang; serta perluasan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat. Pertemuan tersebut juga menyepakati tolak ukur aktivitas pengurangan dan penghapusan oleh pemerintah untuk beberapa elemen-elemen kunci dari visi Drug-Free ASEAN 2015 sebagai berikut :

- a. Pengurangan dan penghapusan budidaya tanaman terlarang
 - a) Menghapuskan pembudidayaan opium di tahun 2015.
 - b) Menghapuskan pembudidayaan ganja di tahun 2015; dan
 - c) Penyediaan mata pencaharian berkelanjutan bagi mantan petani produsen tanaman narkoba dan obat-obatan terlarang.

- b. Pengurangan dan penghapusan industri dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang ilegal serta kejahatan yang berhubungan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang
 - a) Penghapusan sindikat yang terlibat dalam produksi rahasia narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - b) Penghapusan sindikat yang terlibat dalam perdagangan ilegal narkoba dan obat-obatan terlarang, kimia esensial dan bahan kimia lain yang dapat ditransformasi menjadi komponen narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - c) Penghapusan perdagangan dan penyelundupan bahan-bahan kimia yang dapat dijadikan sebagai komponen pembuatan narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - d) Peningkatan kerjasama dan kolaborasi penegakan hukum lintas batas dan transnasional.
- c. Pengurangan dan penghapusan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang
 - a) Pengurangan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang secara umum di masyarakat, khususnya pelajar, pemuda serta kelompok-kelompok yang rentan dan beresiko tinggi, seperti anak jalanan, pekerja seks dan karyawan dengan tuntutan performa kerja tinggi.
 - b) Meningkatkan akses terhadap pengobatan, rehabilitasi and layanan lanjutan bagi pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang agar dapat berinteraksi kembali dengan lingkungan masyarakat.
 - c) Meningkatkan dan memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta dan organisasi sipil dalam merespon penyalahgunaan obat-obatan ilegal.

Poin-poin yang tertuang dalam tolak ukur yang dihasilkan dari *Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendations* antara ASEAN dengan Amerika Serikat tersebut selanjutnya menjadi landasan dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015 oleh para negara anggota.

Langkah-Langkah Penanggulangan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang di Thailand

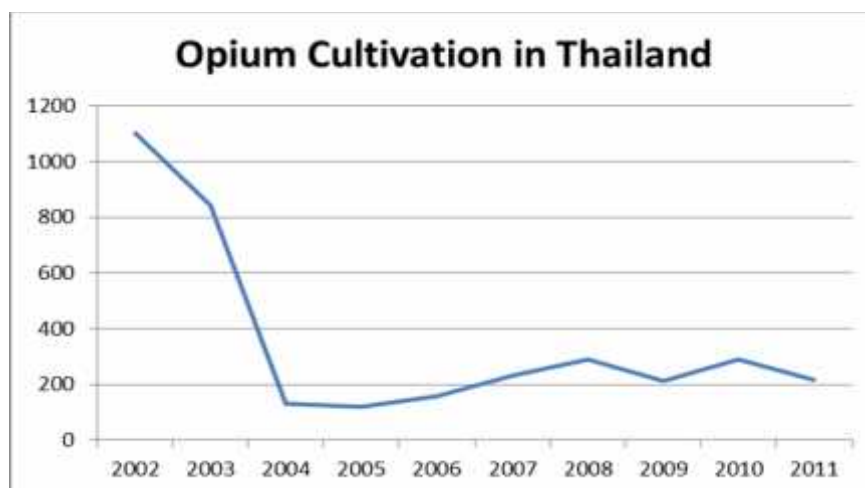
Permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang yang terjadi di Thailand memerlukan adanya suatu kebijakan untuk diimplementasikan agar kedua permasalahan tersebut dapat teratasi menjelang penerapan Drug-Free ASEAN 2015. Dalam membuat suatu kebijakan, pembuat kebijakan dituntut tidak hanya mampu merumuskan suatu kebijakan saja, tapi juga perlu memperkirakan dampak apa yang akan terjadi di masa depan. Berhubungan dengan hal tersebut, David Miller membagi keterkaitan kebijakan dengan prediksi situasi di masa depan kedalam tiga macam (Wibawa, 1994: 65). Pertama, *potential futures*, merupakan situasi sosial di masa depan yang dapat atau mungkin terjadi. Karena situasi ini merupakan kemungkinan bebas, maka 'wilayah' *potential futures* sangatlah luas. Bisa dikatakan, apa yang terbersit dalam pikiran manusia merupakan kemungkinan di masa yang akan datang. Kedua, *plausible futures*, yakni situasi di masa depan yang dapat atau mungkin terjadi jika tidak dilakukan intervensi kebijakan untuk mengubah situasi problematis yang sedang berlangsung pada masa kini. Penciptaan gambar tentang masa depan jenis ini berdasarkan pada asumsi-asumsi tentang hubungan kausal beraneka ragam faktor yang sedang berlangsung di masyarakat. Dan yang terakhir, *normatives futures*, yaitu kondisi masa depan yang akan dibentuk oleh suatu kebijakan. Situasi ini diciptakan berdasar suatu kerangka berpikir analitis terhadap kebutuhan-kebutuhan, nilai-nilai dan kesempatan yang tersedia di masa depan.

Dengan mempertimbangkan unsur kepentingan dan kebaikan di masa depan, maka kebijakan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand didasarkan pada *ACCORD Plan of Action workshop Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendation* yang diikuti oleh Thailand setidaknya ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh masing-masing negara anggota ASEAN dalam penanganan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara signifikan dan berkelanjutan. Langkah – langkah

tersebut meliputi pengurangan dan penghapusan budidaya gelap tanaman narkotika dan obat-obatan terlarang; pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang serta tindak kriminal lainnya yang berkaitan dengan narkotika dan obat-obatan terlarang; dan pengurangan dan penghapusan peningkatan penggunaan narkoba.

Penghapusan lahan budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan bagian dari strategi pemerintah Thailand untuk mengurangi suplai narkotika dan obat-obatan terlarang ke kalangan pedagang maupun pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang. Pemberantasan ladang budidaya paling banyak terjadi pada narkotika dan obat-obatan terlarang jenis opium. Sedangkan pemberantasan lahan budidaya ganja dan kratom yang dilakukan oleh pemerintah terjadi dalam skala yang tidak begitu besar mengingat ladang-ladang ganja dan kratom yang terdapat di Thailand tidak seluas ladang opium di negara ini. Aktivitas pemberantasan ladang narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand dipimpin oleh *Royal Thai Authorities* dan melibatkan beberapa elemen penegak hukum, seperti *Royal Thai Army, Border Patrol Police, dan Operation Centers for Combating Drugs* di tingkat distrik maupun provinsi. Dalam kurun waktu antara 2002 – 2011, penghapusan ladang opium di kawasan utara Thailand menunjukkan hasil yang signifikan. Berikut adalah grafik lahan budidaya opium di Thailand dalam kurun waktu 2002 – 2011 :

Grafik 3.1 Lahan Budidaya Opium Thailand 2002 - 2011



Sumber : Office of the Narcotics Control Board, "Thailand Narcotic Control 2011," 49.

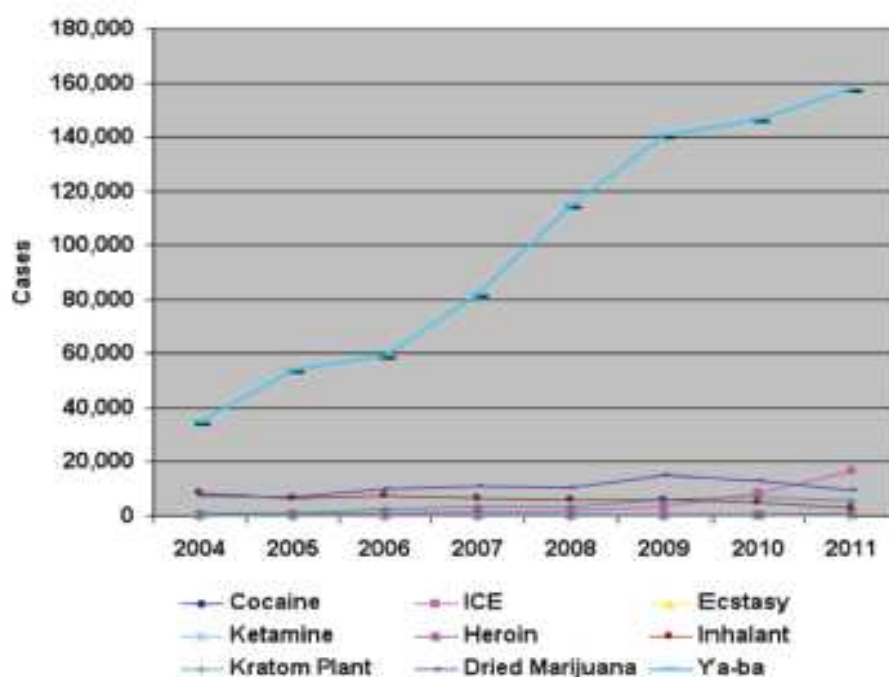
Pemberantasan ladang budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang di beberapa wilayah Thailand menjadikan para petani setempat yang menggantungkan hidup dari aktivitas budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi kehilangan pekerjaannya. Untuk mencegah para petani tersebut kembali melakukan penanaman narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah Thailand bekerjasama dengan UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME mempromosikan 'alternative development' dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan mata pencaharian yang berkelanjutan dan legal bagi para mantan petani narkotika dan obat-obatan terlarang. Melalui *Pang Mahan Reforestation Project*, pemerintah Thailand memberikan bantuan kepada para mantan petani narkotika dan obat-obatan terlarang untuk berpindah mata pencaharian dari budidaya opium ke budidaya komoditas yang legal (<http://www.United Nations Office on Drugs and Crime.org/southeastasiaandpacific/en/2011/12/alternative-development-chiang-mai/story.html>, diakses 20 Mei 2013).

Proses menjadikan Thailand sebagai negara yang bebas narkotika dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015 tidak hanya dilakukan pemerintah Thailand

dengan melakukan operasi pemberantasan lahan budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang. Bersama penegak hukum, pemerintah Thailand juga melakukan operasi pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Antara tahun 2002 hingga 2011, penyitaan dan penangkapan terus dilakukan untuk menekan jumlah peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang yang masuk maupun keluar Thailand. Penangkapan dan penyitaan narkotika dan obat-obatan terlarang paling banyak dilakukan terhadap ya-ba. Tingginya permintaan dari pasar narkotika dan obat-obatan terlarang Thailand membuat jumlah ya-ba yang dibawa masuk maupun beredar di Thailand berlangsung dalam skala besar. Berikut adalah statistik jumlah kasus narkotika dan obat-obatan terlarang di Thailand selama kurun waktu 2004 – 2011 :

Grafik 3.2 Jumlah Kasus Narkotika dan Obat-obatan Terlarang di Thailand 2004 - 2011

Statistics on Number of Cases by Narcotic Substances during 2004 — 2011



Sumber : ONBC, "Thailand Narcotic Control 2011," 49.

Kegiatan pengurangan dan penghapusan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat dilakukan pemerintah Thailand dengan berfokus pada pengurangan suplai dan permintaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Strategi pengurangan suplai narkotika dan obat-obatan terlarang oleh pemerintah Thailand dijalankan melalui pengurangan dan penghapusan budidaya ilegal serta produksi dan perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan terlarang. Sedangkan strategi pengurangan permintaan narkotika dan obat-obatan terlarang dilakukan melalui beberapa aktivitas pencegahan. Kegiatan pencegahan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan masyarakat meliputi kampanye anti narkotika dan obat-obatan terlarang; promosi hidup sehat tanpa narkotika dan obat-obatan terlarang; sosialisasi pencegahan narkotika dan obat-obatan terlarang di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja; serta pembentukan gerakan pemuda sadar narkotika dan obat-obatan terlarang.

Selain melakukan tindak pencegahan penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah Thailand juga memberikan perawatan dan rehabilitasi bagi para

pengguna yang ingin terbebas dari kecanduan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang. Lembaga perawatan dan rehabilitasi pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang yang terdapat di Thailand tidak hanya dikelola oleh pihak pemerintah tapi juga swasta. Untuk meringankan biaya perawatan dan rehabilitasi yang dilakukan di fasilitas milik swasta, pemerintah mengeluarkan subsidi agar pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang tidak terbebani oleh biaya perawatan dan rehabilitasi yang mahal. Disamping menggunakan bantuan dari pemerintah, kegiatan perawatan dan rehabilitasi juga memberdayakan masyarakat setempat.

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam pengurangan dan penghapusan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang adalah dengan mendeklarasikan provinsi bebas narkoba dan obat-obatan terlarang pada 2002. Deklarasi tersebut menetapkan Provinsi Kalasin sebagai provinsi pertama di Thailand yang terbebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (Office of the Narcotics Control Board, 2002: 56). Selanjutnya, pemerintah Thailand mengupayakan agar 20 provinsi di timur laut Thailand yang rentan dengan permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang untuk menjadi provinsi berikutnya yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang (http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6167&a=2, diakses 20 mei 2013). Selain itu, Thailand juga membentuk komunitas bebas narkoba dan obat-obatan terlarang, yaitu komunitas Ban Klong Bang Lao. Komunitas Ban Klong Bang Lao ini dijadikan sebagai percontohan dalam isu pemberantasan dan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang ketika pemerintah Kamboja melakukan kunjungan ke Thailand pada 2002 (Office of the Narcotics Control Board, 2002: 77).

Menuju implementasi Drug-Free ASEAN 2015, pemerintah Thailand berupaya untuk melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang. Posisi Thailand dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang tidak hanya sebagai produsen tapi juga jalur perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang internasional menjadikan negara ini tidak dapat melakukan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang tanpa bantuan dari negara-negara lainnya. Disamping itu, implementasi Drug-Free ASEAN menuntut Thailand untuk tidak hanya berfokus pada penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di tingkat domestik negara tapi juga di tingkat regional ASEAN. Oleh karena itu selain dilakukan secara domestik pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh Thailand juga melibatkan negara-negara anggota ASEAN lainnya maupun negara di luar ASEAN. Untuk mengoptimalkan upaya bersama dalam memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang menghadapi Drug-Free ASEAN 2015, Thailand melakukan kerjasama dengan beberapa negara.

Kerjasama luar negeri Thailand dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang dilakukan dengan kerangka sebagai anggota ASEAN maupun sebagai individu negara. Dalam kapasitasnya sebagai salah satu anggota ASEAN, Thailand beserta anggota lainnya membentuk *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD). Kerjasama Thailand dengan negara anggota ASEAN lainnya dalam kerangka kerja ASOD meliputi beberapa aktivitas seperti pelatihan konseling mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang, pemberdayaan pemuda di ASEAN untuk melawan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang, mempromosikan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan, serta pelatihan terkait penegakan hukum, perawatan, dan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang (Mere, n.d: 3).

Disamping melakukan kerjasama dengan negara anggota ASEAN lainnya Thailand beserta para anggota ASEAN melakukan kerjasama dengan China dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pemilihan Cina sebagai rekan kerjasama tidak terlepas dari keyakinan ASEAN, termasuk Thailand, bahwa Cina dapat membantu ASEAN untuk mencapai status Drug-Free pada 2015. Kerjasama antara kedua pihak tersebut disebut sebagai *ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs*

(ACCORD). Melalui kerjasama ini Thailand, China, beserta negara-negara ASEAN lainnya mendeklarasikan keinginan mereka untuk mewujudkan drug-free ASEAN di tahun 2015.

Selain melakukan kerjasama di dalam kerangka organisasi ASEAN, Thailand sebagai individu negara juga melaksanakan kerjasama dengan negara-negara lainnya, khususnya negara yang selama ini memiliki peran cukup besar terhadap permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand, seperti Myanmar, Laos, dan China. Thailand memiliki kerjasama bilateral terkait *Narcotics on Law Enforcement Cooperation* baik dengan Myanmar dan Laos. Kerjasama bilateral antara Thailand dan Laos tersebut membuahkan hasil dengan penyitaan lebih dari 1 juta tablet metamfetamin di perbatasan kedua negara (Office of the Narcotics Control Board, 2005: 93). Di lain pihak, salah satu capaian penting dari kerjasama bilateral Myanmar – Thailand adalah dengan ditangkapnya Preecha Leamsari, bandar narkoba dan obat-obatan terlarang besar Myanmar, di Thailand yang kemudian diekstradisi ke Myanmar (Office of the Narcotics Control Board, 2005: 94). Lebih lanjut, untuk mendukung Myanmar dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015, Thailand memberikan bantuan kepada Myanmar sebesar 15 juta Bath (<http://www.pattayamail.com/news/thailand-contributes-thb15-mil-to-help-myanmar-become-drug-free-10298>, diakses 20 Mei 2013). Melalui pemberian bantuan ini, Thailand berharap dana tersebut dapat membantu Myanmar dalam memberantas budidaya opium. Bantuan lain juga diberikan oleh Thailand sebesar 20 juta Baht kepada Myanmar untuk membangun desa percontohan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang di Shan State (http://news.xinhuanet.com/english/2002-10/12/content_593612.htm, diakses 20 mei 2013).

Thailand juga melakukan kerjasama dengan Cina dan Laos seiring dengan diresmikannya R3A. Pada April 2011 Cina, Laos, dan Thailand meresmikan *ASEAN Highway 3* (R3A) (<http://www.chiangraitimes.com/news/11761.html>, diakses 30 Mei 2013). R3A merupakan bagian *ASEAN Highway* yang menghubungkan Kunming, Cina dengan Bangkok, Thailand melalui Laos. Peresmian jalan raya ini ditujukan agar para pedagang dari Cina, Laos, dan Thailand mendapatkan kemudahan dalam melakukan ekspedisi produk mereka melalui jalur darat. Namun dengan diresmikannya R3A juga menimbulkan potensi penggunaan jalan raya ini sebagai jalur perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi potensi tersebut Cina, Laos, dan Thailand membentuk *joint-fact finding survey* di rute RA3 ini (Office of the Narcotics Control Board, 2011: 10).

Tantangan Thailand dalam Melawan Narkoba dan Obat-obatan Terlarang Menuju Drug-Free ASEAN 2015

Implementasi Drug-Free ASEAN pada 2015 tinggal menunggu waktu, tapi upaya yang dilakukan oleh Thailand dalam memberantas dan menanggulangi narkoba dan obat-obatan terlarang belum mampu menjadikan negara tersebut bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya angka kasus perdagangan dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand. Selama kurun waktu 2004 hingga 2011, jumlah kasus narkoba dan obat-obatan terlarang terus mengalami kenaikan. Hal ini dapat dipandang sebagai kerasnya kinerja para penegak hukum serta semakin banyaknya permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand sehingga jumlah kasus yang terjadi turut mengalami kenaikan. Kondisi ini tentu kontradiktif dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Thailand, yaitu menjadi negara yang bebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang. Lebih lanjut, meningkatnya angka kasus narkoba dan obat-obatan terlarang menunjukkan adanya tantangan dalam penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berikut adalah beberapa tantangan yang menghalangi langkah-langkah Thailand dalam pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015.

Aktivitas budidaya, pengolahan, dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi yang terdapat dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang menjadi penopang bagi kelangsungan aktivitas tersebut. Lebih lanjut, keuntungan secara materi yang menggiurkan dari perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang menjadi faktor yang menarik kalangan masyarakat untuk terlibat dalam jaringan tersebut. Sebagai gambaran, pada rantai peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang, bandar narkoba dan obat-obatan terlarang memiliki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah besar dari transaksi perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dibandingkan para pelaku yang hanya berperan sebagai pembudidaya atau pengolah narkoba dan obat-obatan terlarang. Pada transaksi ya-ba di tahun 2010, bandar narkoba dan obat-obatan terlarang membeli satu pil ya-ba dengan harga rata-rata sekitar 3 Bath (<http://www.nationmultimedia.com/home/2010/08/01/national/Prisons-bursting-with-drug-offenders-30134979.html>, 21 Mei 2013). Selanjutnya, ya-ba tersebut akan mereka jual dengan kisaran harga antara 200 hingga 400 Bath per butir. Dengan kata lain, dalam transaksi yang hanya melibatkan satu pil ya-ba bandar narkoba dan obat-obatan terlarang memperoleh keuntungan berlipat-lipat.

Besarnya keuntungan bandar narkoba dan obat-obatan terlarang juga terjadi pada perdagangan opium dan heroin di Thailand. Para produsen heroin maupun bandar narkoba dan obat-obatan terlarang membeli opium dari petani setempat dengan harga 1050 US\$/kg di tahun 2006 (United Nations Office on Drugs and Crime, 2006: 15). Oleh bandar narkoba dan obat-obatan terlarang, opium tersebut kemudian dijual di kisaran harga 2.100 US\$. Keuntungan sebesar 1050 US\$ atau dua kali lipat dari harga awal dapat diperoleh dengan mudah oleh para bandar tersebut. Keuntungan dengan nominal yang lebih besar bisa diperoleh jika opium yang dibeli dari petani tersebut diolah menjadi heroin. Produsen heroin di Thailand produk olahan mereka dengan harga tiga kali lipat dari harga awal opium yang mereka beli.

Selain karena kepentingan ekonomi, tantangan dalam penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand juga disebabkan oleh kinerja penegak hukum dan pemerintah. Pelaksanaan penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand melibatkan peran pekerja pemerintah termasuk para penegak hukum. Dalam implementasi penanggulangan dan pemberantasan narkoba dan obat-obatan terlarang, penegak hukum Thailand dituntut untuk melakukan penegakan hukum secara profesional. Namun, tidak semua penegak hukum di Thailand dapat menjalankan penegakan hukum terhadap kasus narkoba dan obat-obatan terlarang secara baik. Beberapa penegak hukum dan pegawai pemerintah justru ikut terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Office of the Narcotics Control Board menyebutkan bahwa antara tahun 2008-2010 pemerintah Thailand melakukan penangkapan terhadap pegawai pemerintah yang memiliki peran dalam perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang. Jumlah pegawai pemerintah yang ditangkap selama kurun waktu tersebut mencapai 338 orang.

Sejak awal masuknya narkoba dan obat-obatan terlarang ke Thailand, wilayah utara Thailand menjadi pintu utama bagi perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Interaksi komunitas etnis utara Thailand dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibawa masuk ke Thailand bermula sejak saat ini, khususnya beberapa narkoba dan obat-obatan terlarang hasil budidaya seperti opium, ganja, dan kratom. Selain membudidayakan opium, beberapa kalangan masyarakat setempat menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang-narkoba dan obat-obatan terlarang tersebut dalam keseharian mereka. Opium digunakan oleh anggota suku-suku ini sebagai bahan baku mereka ketika merokok untuk mendapatkan ketenangan. Sedangkan ganja dan kratom adakalanya dipergunakan oleh masyarakat sebagai bahan makanan sehari-hari. Tidak hanya itu, ganja juga digunakan oleh penduduk suku pendalaman utara Thailand sebagai obat tidur dan perangsang nafsu makan bagi orang sakit (<http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/>

371/ille/library/spicer-e.htm, diakses 23 Mei 2013). Penggunaan ganja lainnya juga dilakukan untuk mengatasi sakit diare dan disentri di kalangan masyarakat setempat. Lekatnya kehidupan masyarakat suku pedalaman dengan beberapa jenis narkoba dan obat-obatan terlarang ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Thailand yang menginginkan wilayahnya terbebas dari narkoba dan obat-obatan terlarang sepenuhnya di tahun 2015 seiring dengan implementasi Drug-Free ASEAN.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Thailand melakukan upaya internal dan eksternal dalam penanggulangan permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015. Langkah penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang secara internal oleh Thailand dilakukan dengan menggunakan panduan yang dihasilkan dalam *Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendation*. Berdasarkan panduan tersebut ada tiga langkah internasional yang dilakukan Thailand untuk mengurangi dan memberantas narkoba dan obat-obatan terlarang, yaitu pengurangan dan penghapusan budidaya gelap tanaman narkoba dan obat-obatan terlarang; pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang serta tindak kriminal lainnya yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang; dan pengurangan dan penghapusan peningkatan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Upaya eksternal Thailand untuk menanggulangi narkoba dan obat-obatan terlarang dilaksanakan melalui pengadaan perjanjian dan kerjasama internasional.

Upaya pengurangan dan penghapusan budidaya gelap tanaman narkoba dan obat-obatan terlarang yang dilaksanakan oleh pemerintah Thailand selama kurun waktu 2000-2011 menunjukkan berkurangnya lahan budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang secara signifikan, khususnya pada lahan budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang jenis opium. Aktivitas penghapusan ladang budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang dengan hasil paling signifikan terjadi pada antara tahun 2003 – 2004 seiring dengan implementasi kebijakan War on Drug pemerintah Thailand di bawah kepemimpinan Thaksin Shinawatra. Pada tahun-tahun selanjutnya, Thailand berhasil meminimalisasi luas lahan budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang. Penghapusan ladang budidaya narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand diiringi dengan implementasi program *alternative development* yang mengajak mantan petani narkoba dan obat-obatan terlarang untuk menanam budidaya tumbuhan lain yang legal dan bermanfaat. Program ini juga menawarkan bantuan alat pertanian dan akses pasar untuk menarik minat para mantan pembudidayaan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Langkah internal berikutnya yang dijalankan oleh pemerintah Thailand adalah pengurangan dan penghapusan produksi dan perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang serta tindak kriminal lainnya yang berkaitan dengan narkoba dan obat-obatan terlarang. Pemerintah Thailand melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap para produsen dan pelaku perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan hasil penangkapan dan penyitaan narkoba dan obat-obatan terlarang oleh pemerintah Thailand, diketahui bahwa penyitaan narkoba dan obat-obatan terlarang lebih banyak terjadi pada jenis metamfetamin khususnya ya-ba.

Selain menggunakan strategi pengurangan dari sisi suplai narkoba dan obat-obatan terlarang, Thailand juga melakukan strategi pengurangan permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Strategi pengurangan permintaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan pengguna dan masyarakat ini dilakukan melalui aktivitas pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Pencegahan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dilaksanakan dengan menggelar kampanye hidup bebas narkoba dan obat-obatan terlarang; sosialisasi pencegahan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan keluarga, sekolah, dan tempat kerja; dan pembentukan gerakan pemuda sadar narkoba dan obat-obatan terlarang.

Bagi masyarakat dengan ketergantungan narkoba dan obat-obatan terlarang, pemerintah menyediakan perawatan dan rehabilitasi. Implementasi strategi pengurangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand turut melibatkan peran dari berbagai NGO dan pihak swasta.

Disamping melakukan penanggulangan secara internal, pemerintah Thailand juga mengeluarkan kebijakan penanggulangan secara eksternal. Kebijakan ini tercermin dalam kerjasama internasional Thailand dengan negara-negara lainnya baik secara bilateral maupun multilateral. Kerjasama bilateral yang melibatkan Thailand dalam penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang banyak dilakukan dengan negara-negara tetangga, yaitu Myanmar dan Laos. Kebijakan Thailand untuk banyak melakukan kerjasama dengan Myanmar dan Laos tidak lepas dari peran penting kedua negara tersebut dalam produksi dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang yang masuk ke Thailand. Sedangkan kerjasama multilateral yang diikuti oleh Thailand banyak melibatkan negara-negara ASEAN dan juga Cina sebagai negara yang memiliki peran penting dalam perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara.

Di balik upaya internal dan eksternal Thailand berdasarkan kerangka kerja yang telah disepakati untuk mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015 namun Thailand menghadapi tantangan-tantangan terkait upaya penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Tantangan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang Thailand menuju Drug-Free ASEAN 2015 meliputi kepentingan ekonomi, kurang maksimalnya penegakan hukum, dan unsur budaya dalam penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Kepentingan ekonomi sebagai tantangan penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang di Thailand dikarenakan nilai ekonomis komoditas narkoba dan obat-obatan terlarang. Transaksi narkoba dan obat-obatan terlarang memberikan keuntungan yang berlipat bagi para pelakunya. Bagi masyarakat di utara Thailand, hasil keuntungan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang dapat menjamin kebutuhan sehari-hari mereka yang hidup dengan pendapatan tahunan di bawah pendapatan per kapita Thailand.

Tantangan lain dalam penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang Thailand juga disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja penegak hukum setempat. Para penegak hukum yang seharusnya melakukan penangkapan terhadap sindikat perdagangan gelap narkoba dan obat-obatan terlarang justru diantaranya terlibat dalam sindikat tersebut. Meskipun jumlah oknum yang terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak banyak, tapi dengan adanya keterlibatan penegak hukum tersebut membuat proses penegakan hukum bagi para produsen dan pelaku perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang tidak dapat berjalan semestinya.

Penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang sebagai bagian dari kebudayaan suku etnis di Thailand juga menjadi tantangan bagi Thailand untuk menjadikan wilayahnya dan ASEAN bersih sepenuhnya dari perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang. Suku-suku etnis di utara Thailand menggunakan beberapa jenis narkoba dan obat-obatan terlarang seperti opium, ganja, dan kratom sejak nenek moyang mereka. Memisahkan suku etnis tersebut dari penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dalam kehidupan mereka bukan hal yang mudah karena hal tersebut telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Thailand telah banyak melakukan usaha-usaha dalam menanggulangi permasalahan narkoba dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015. Namun demikian, karena produksi dan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang ini merupakan bentuk kejahatan transnasional yang bekerja secara rapi maka dibutuhkan usaha yang lebih untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Thailand dituntut untuk lebih serius dalam menangani kejahatan perdagangan ini. Peningkatan kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral sangat penting dalam membantu menangani masalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Wibawa, Samodra Wibawa. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994.

Crooker, Richard. "Forces of Change in the Thailand Opium Zone" *American Geographical Society* 78:3 (July, 1988): 241-256. <http://www.jstor.org/stable/214999> (diakses 20 Maret 2013).

Emmers, Ralf. *The Securitization On Transnational Crime in Asia*, (working paper, Institute Defence and Strategic Studies Singapore, 2002). <http://www.rsis.edu.sg/publications/WorkingPapers/WP39.pdf> (diakses 3 April 2013).

_____. *The Threat of Transnational Crime in Souteast Asia : Drug Trafficking, Human Smuggling and Trafficking, and Sea Piracy*, (discussion paper, Institute of Defence and Strategic Studies Singapore, 2003). <http://dspace.cigilibrary.org/jspui/bitstream/123456789/23754/1/The%20Threat%20of%20Transnational%20Crime%20in%20Southeast%20Asia%20Drug%20Trafficking%20ohuman%20Smuggling%20and%20Trafficking%20and%20Sea%20Piracy.pdf> (diakses 4 April 2013).

Taskarina, Leebarty. "Clandestine Laboratory: Analisis Faktor Pendorong Berkembangnya Laboratorium Gelap Narkotika di Indonesia dalam Konteks *Transnational Organized Crimes* (TOCs)" *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6:3 (Desember 2010): 203-15. <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/viewFile/1103/1011> (diakses 15 Maret 2013).

Wibawa, Samodra Wibawa. *Kebijakan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994.

Laporan, Paper

Office of the Narcotics Control Board, *Thailand Narcotics Annual Report 2002*.

_____. *Thailand Narcotics Annual Report 2003*.

_____. *Thailand Narcotics Annual Report 2007*.

_____. *Thailand Narcotics Annual Report 2008*.

_____. *Thailand Narcotics Annual Report 2010*.

_____. *Thailand Narcotics Annual Report 2011*.

Mere, Gories. "ASEAN's Response to the Prevalence of Illicit Drugs Trafficking " (on The 8th Meeting of the AIPA Fact Finding Committee, 2011).

United Nations Office of Drugs and Crime. *Amphetamine and Ecstasy : 2011 Global ATS Assessment*.

_____. *Opium Poppy Cultivation in the Golden Triangle 2006*

_____. *Opium Poppy Cultivation in South-East Asia 2009*.

_____. *South-East Asia Opium Survey 2012*.

Website

Anonymous. *Marijuana (herb) Retail and wholesale prices and purity level, by drug, region and country or territory*. 2011. http://164.100.47.134/plibrary/ebooks/World_Drug_Report_2012/Files/Prices/Prices_CannabisType.pdf

Association of South East Asia Nations (ASEAN), "Joint Declaration for a Drug-Free ASEAN", 25 Juli 1998, <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-declaration-for-a-drug-free-asean> (diakses 15 Maret 2013).

_____. "Joint Communique of the 33rd ASEAN Ministerial Meeting 2000" <http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-communique-of-the-33rd-asean-ministerial-meeting-bangkok-thailand-24-25-july-2000>, (diakses 15 Mei 2013).

Corben, Ron. "UN: Meth Use Surging in Southeast Asia", *VOA News*, 14 September, 2011, <http://m.voanews.com/a/167990.html> (diakses 5 Mei 2013).

Samabuddhi, Kutilda. "Bad cops and the Thai image", *Bangkok Post*, 21 Desember 2012, <http://www.bangkokpost.com/learning/learning-from-news/327755/thailand-police-corruption-problem> (diakses 20 Mei 2013).

Sarnsamak, Pongphon. "Prison bursting with drug offenders", *The Nation*, 1 Agustus 2010, <http://www.nationmultimedia.com/home/2010/08/01/national/Prisons-bursting-with-drug-offenders-30134979.html> (diakses 21 Mei 2013).

Spicer, Leah. "Historical dan Cultural use of Cannabis and the Canadian "Marijuana Clash"", 2002. <http://www.parl.gc.ca/content/sen/committee/371/ille/library/spicer-e.htm#PART I>.

Tingchang, Duang. "Roundup: Myanmar strengthens international cooperation in drug control", *Xinhua News Agency*, 12 Oktober 2002, http://news.xinhuanet.com/english/2002-10/12/content_593612.htm.

United Nations Office on Drug and Crime (UNODC), "Methamphetamine remains primary illicit drug threat in Asia". <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2012/07/smart-regional-workshop/story.html> (diakses 5 Mei 2013).

_____. "Partnership Against Transnational-crime through Regional Organized Law-enforcemen (PATROL)", n.d., http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/Projects/2009_04/Transnational_Crim e.html. (diakses 30 Mei 2013).

_____. "Thai alternative development projects showcased at international workshop". <http://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2011/12/alternative-development-chiang-mai/story.html> (diakses 20 Mei 2013).

The Government Public Relation Department, "Government to Cut the Number of Drug Addict by 400.000 in 2012", 21 Januari 2012, http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6105&a=2.

The Government Public Relations Department, "Making Northeastern Provinces Drug-Free Areas". http://thailand.prd.go.th/view_news.php?id=6167&a=2 (diakses 20 Mei 2013).

World Bank, "Gross National Income per capita", <http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD/countries?page=1> (diakses 21 Mei 2013).

“Chiangrai’s R3A Highway bringing China’s Produce to Thailand”, *Chiangrai Times*, 19 November 2012, <http://www.chiangraitimes.com/news/11761.html> (diakses 30 Mei 2013).

“Thailand’s War on Drugs,” Global Security, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/thai-drug-war.htm> (diakses 21 Mei 2013).

“The War on Drugs, HIV/AIDS, and Violations of Human Rights in Thailand,” Human Rights Watch, <http://www.hrw.org/legacy/campaigns/aids/2004/thai.htm> (21 Mei 2013).